



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : KAPANEWON

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **BANGUN RAHINA**
2. Jabatan : **PANEWU**
3. NHK : **435597**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.902.000.000

1. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 76.000.000
2. Tanah Seluas 188 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 94.000.000
3. Tanah Seluas 302 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 561 m2/400 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 2.244.000.000
5. Tanah Seluas 429 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 214.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 399 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 79.900.000
7. Tanah Seluas 639 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 191.700.000
8. Tanah Seluas 623 m2 di KAB / KOTA BANTUL, WARISAN Rp. 186.900.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 364 m2/90 m2 di KAB / KOTA GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 664.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 231.000.000

1. MOBIL, CHEVROLET CAPTIVA SUV Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000



2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET TRAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 39.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.535.725

F. HARTA LAINNYA Rp. 95.000.000

Sub Total Rp. 4.269.535.725

III. HUTANG Rp. 841.876.200

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.427.659.525

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.